	PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	Nomor SOP	900/283/XI/2019
		Tanggal Pembuatan	11 November 2019
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	1 Januari 2020
		Disahkan Oleh	Kepala Badan Keuangan
BADAN KEUANGAN		**Nama SOP**	Pencatatan Utang Pihak Ketiga

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 10. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2018 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya 11. Peraturan Daerah Mamuju Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah 12. Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah	1. Memiliki kemampuan pengoperasional komputer; 2. Memiliki kemampuan pengoperasional aplikasi keuangan; 3. Memiliki kemampuan menganilisa data; 4. Mengetahui tigas dan fungsi organisasi.
Keterkaitan / Pihak Terkait	**Peralatan / Perlengkapan**
1. SOP - Penyusunan Anggaran Kas 2. SOP - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) 3. Bendahara PengeluaranSKPD 4. Kepala SKPD 5. Kepala BPKAD 6. Sekretaris BPKAD 7. Kepala Bidang Anggaran	1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Aplikasi Pengelola Keuangan Daerah 5. Surat permohonan SKPD 6. Lembar Disposisi 7. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA)

	8. Jaringan internet
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika prosedur tidak dilaksanakan akan berakibat pada pengendalian yang tidak valid, akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah	Disipan sebagai data elektronik dan manual

BPKPAD KABUPATEN MAMUJU TENGAH									Halaman : 2 /4
	Pencatatan Utang Pihak Ketiga								

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Buku			Keterangan
		BUPATI	SEKDA	PPKD	OPD	BID. ANGGARAN	KASI EVALUASI DAN PELAKSANAN APBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekretaris Daerah membuat surat edaran terkait rekapitulasi utang pihak ketiga kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah		MULAI					Surat Edaran	2 Hari		
2	Pimpinan OPD menyampaikan permintaan rekapitulasi utang pihak ketiga beserta dokumen Pihak ketiga pada masing-masing OPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD							Dokumen	5 hari	Laporan daftar utang	Sesuai daftar lelang dan PL
3	PPKD meneruskan rekaptulasi utang pihak ketiga OPD ke Bidang Anggaran.							Dokumen	2 hari	Laporan daftar utang OPD	
4	Kepala Bidang Anggaran meneruskan Rekapitulasi Utang Pihak Ketiga OPD ke Kepala Seksi Evaluasi dan pelaksanaan APBD							Dokumen	1 hari	Laporan daftar utang OPD	
5	Kepala seksi evaluasi dan pelaksanaan APBD menghimpun dan					A		Dokumen	5 hari	Daftar utang terverifikasi	Evaluasi terhadap laporan

	merekapitulasi daftar utang pihak ketiga dari OPD dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Anggaran						A				realisasi pencairan OPD, daftar lelang dan PL
6	Kepala Bidang Anggaran melakukan evaluasi terhadap rekapitulasi daftar utang dan menyampaikan ke PPKD dan menyimpan arsip.							Daftar utang terverifikasi	3 hari	Laporan daftar Utang Daerah	
7	PPKD menyampaikan daftar Utang Pihak Ketiga kepada Sekretaris Daerah							Laporan daftar Utang Daerah	1 hari	Laporan daftar Utang Daerah	Laporan hasil verifikasi
8	Sekretaris Daerah menyampaikan daftar Utang pihak ketiga kepada Bupati.							Laporan daftar Utang Daerah	2 hari	Laporan daftar Utang Daerah	
9	Bupati menyampaikan surat pemberitahuan Daftar Utang kepada Pihak ketiga kepada Pimpinan DPRD dan sekaligus dilakukan pembayaran mendahului APBD Perubahan	SELESAI						Laporan daftar Utang Daerah	2 hari	Surat Penyampaian ke Pimpinan DPRD	
									23 hari		Waktu Normatif

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Drs. MANSYUR. M
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.: 19621021 199010 1 001